



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : EDDY NICOLAS LESNUSA
2. Jabatan : KEPALA BIRO
3. NHK : 486508

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.800.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/110 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 720 m2/500 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , WARISAN Rp. 1.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 149.000.000

1. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOTOR, YAMAHA SCOOPY Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
3. MOBIL, HONDA MOBILIO Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 5.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 6.202.510

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 1.960.202.510

III. HUTANG Rp. 175.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.785.202.510

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.